

Morfologi Spasial Lingkungan di Kawasan Malabar-Merbabu Malang

Previa Sandyangsani¹, Sigmawan Tri Pamungkas², Lisa Dwi Wulandari²

¹Jurusan Arsitektur Fakultas/Teknik Universitas, Brawijaya Malang

²Dosen Jurusan Arsitektur/Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Alamat Email penulis: baptistaprevia@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Malabar-Merbabu pada perkembangannya sekarang ini didominasi dengan fungsi ekonomis dimana terjadi pergeseran fungsi kawasan dan bangunan dari fungsi hunian privat menjadi hunian komersial dan non-hunian komersial. Letak dan karakter eks-kolonial pada kawasan berpengaruh pada perubahan fungsi ekonomis yang ada pada kawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami morfologi spasial lingkungan pada kawasan Malabar-Merbabu Malang melalui perubahan spasial yang ada pada kawasan. Analisa dilakukan berdasarkan aspek tata guna lahan, tata letak massa, tata kavling dan tata sirkulasi. Pada tahap analisa, tata guna lahan kawasan sebagai permukiman mengalami perubahan dominasi area terbangun pada kawasan (*solid*). Dimana kawasan *Bergenbuurt* merupakan kawasan yang memiliki ruang terbuka yang cukup luas. Pada aspek tata letak massa pada bangunan didominasi oleh adanya bentuk persegi dan persegi panjang pada kawasan. Tata letak massa yang berpengaruh pada penataan kavling pada kawasan yang cenderung tidak mengalami banyak perubahan bentuk karena kawasan tergolong sebagai kawasan yang terencana sebagai kawasan permukiman. Selain itu, adanya perubahan tata sirkulasi pada kawasan turut mempengaruhi keberadaan parkir maupun jalur untuk kendaraan dan pejalan kaki pada kawasan. Secara keseluruhan perubahan yang terjadi pada kawasan dipengaruhi oleh aspek tata guna lahan, tata letak massa, tata kavling dan tata sirkulasi.

Kata kunci: morfologi spasial, lingkungan, bangunan

ABSTRACT

Malabar-merbabu area on its progress now dominated with this function happened economical where shifts function and building the area of private function occupancy become occupancy commercial and non-occupancy commercial. The layout and character eks colonial in regional influential on function changes economical there was in the area. The purposed of this research is to understand spatial morphology environment in regional malabar-merbabu unfortunate through spatial changes that were on the area. Based on analysis conducted aspects in order to land management, the layout of the mass, tata and tata kavling circulation. On the stage of analysis, land use as residential area undergoing change domination of built-up areas in regional (solid). Bergenbuurt area is a region that has open space big enough. On aspects of mass structure dominated by the presence of a square shape and rectangular in regional. The layout mass that affects an arrangement for the inclined not undergoing many changes of form is the area is considered as the planned as a residential. In addition, the change in circulation pattern also influence the parking lot and track for vehicle and pedestrian ways. Overall changes the affected by aspects of land use, mass structure, plot, and circulation pattern.

Keywords: morphology spatial, environment, building

1. Pendahuluan

Kota Malang sebagai salah satu perencanaan kota kolonial terbaik di Hindia Belanda mendapatkan sebutan sebagai “*Paris Van Oost Java*” (Handinoto, 1996). Hal tersebut menjadikan Malang memiliki identitas kota yang ada sejak jaman dahulu. Identitas kota tersebut dikenal secara visual bangunan, penataan bangunan serta ruang terbuka yang ada. Beberapa peninggalan arsitektur bangunan dengan karakter gaya kolonial yang bernilai kultural salah satunya adalah pada kawasan *eks-Bergenbuurt* mengalami perkembangan dan pergeseran.

Kawasan *Bergenbuurt* merupakan bagian dari pembangunan *Bouwplan V* sebagai suatu kawasan hunian yang direncanakan dan dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun antara 1924/1925 (Handinoto, 1996). Tujuan adanya pembangunan kawasan ini adalah sebagai hunian bagi kaum bangsa Eropa yang sedang berkembang pesat di kota Malang. Kawasan ini berada pada bagian barat kota dikarenakan letak geografis tanah yang relatif tinggi dan mencegah adanya perkembangan kota semakin menjauhi pusat kota sehingga relatif nyaman sebagai tempat tinggal maupun hunian.

Seiring perkembangan kota sekarang ini, kawasan Malabar-Merbabu sebagai kawasan *eks-Bergenbuurt* mengalami perkembangan kawasan. Pada perkembangan kawasan ini muncul adanya pergeseran guna lahan dari hunian privat menjadi ekonomis. Penggunaan lahan lainnya meliputi perdagangan, jasa, perkantoran, pendidikan, hunian komersial, serta fasilitas umum lainnya. Perkembangan yang ada dikarenakan kebutuhan akan perdagangan dan jasa yang semakin meningkat. Pergeseran fungsi yang ada pada kawasan pun dilakukan dengan penambahan fungsi pada bangunan.

Menurut Hermanislamet (1981, dalam Budiharjo, 1983) spasial adalah berhubungan dengan tata ruang, serta perletakan massa dalam kawasan. Dalam tolak ukur dari tata ruang sendiri adalah kecocokan terhadap fungsi, luasan, lokasi dan aksesibilitas antar ruang. Apabila ditarik dari permasalahan bangunan kuno maupun kawasan hunian di kawasan Malabar-Merbabu maka teori morfologi spasial diharapkan dapat memecahkan permasalahan spasial yang ada pada kawasan. Kawasan Malabar-Merbabu merupakan kawasan dengan kategori zona pengendalian rendah, namun pergeseran fungsi seharusnya tetap berdasarkan pada peraturan yang berlaku sesuai tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030 Bab IX Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Pasal 65 No.3h “Kawasan hunian atau perumahan dengan nilai sejarah tertentu, memiliki aturan dalam penetapan bentuk bangunan harus dipertahankan dengan adanya perubahan fungsi yaitu menjadi fungsi non-hunian”.

Perkembangan kawasan Malabar-Merbabu terkait dengan fungsi kawasan sebagai kawasan permukiman. Perumahan merupakan kawasan yang memiliki banyak potensi untuk berkembang, baik dari segi ekonomis maupun segi sejarah pelestarian. Perumahan merupakan kompleks yang menarik untuk dilestarikan, melihat sisi perkembangan wilayah keadaan spasial kawasan banyak terjadi pergeseran yang terjadi baik dari guna lahan sebagai fungsi permukiman, keberadaan kavling bangunan yang berubah mengikuti fungsi bangunan baru, serta sirkulasi pada kawasan yang cenderung kurang memenuhi kebutuhan pengguna.

Meninjau beberapa adanya persoalan mengenai penataan guna lahan, tata letak massa, tata kavling dan tata sirkulasi tersebut sesuai dengan teori morfologi menurut Conzen (1960, dalam Carmona, 2003) dapat menjadi pembahasan spasial lingkungan. Dari

sisi lain, aspek pelestarian pada kawasan dan bangunan menjadi aspek penting yang menjadi ciri khas kota Malang. Sebagaimana tertulis adanya Cagar budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 sebagai warisan budaya dengan sifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya baik di darat maupun di air dengan nilai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau kebudayaan perlu di lestarikan keberadaannya melalui proses penetapan.

Pelestarian terhadap bangunan lama didukung pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Malang pada tahun 2010-2030 Pasal 18 tentang Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota. Sebagaimana Pemerintah Kota Malang berupaya melakukan pelestarian pada kawasan studi yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 63 tentang “mengenai kegiatan pelestarian meliputi adanya perawatan, kegiatan konservasi atau preservasi maupun pemeliharaan kawasan baik bangunan dan lingkungan untuk mempertahankan serta mengembalikan orisinalitas kawasan”.

2. Metode

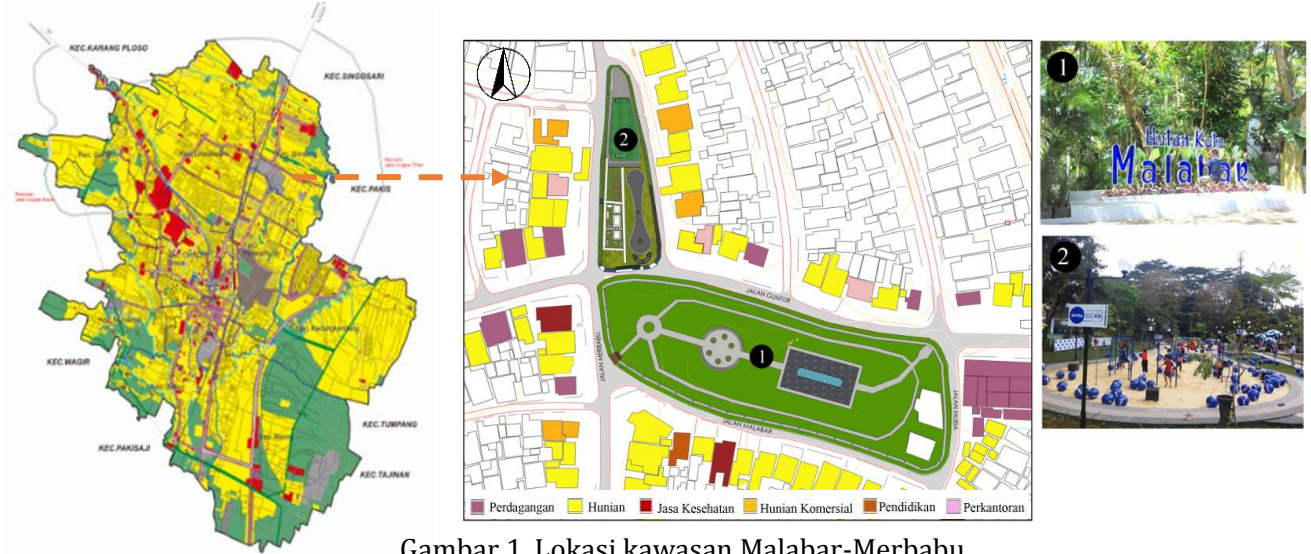
Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan morfologi diakronik. Morfologi diakronik dengan menelaah asal-usul kawasan berdasarkan sejarah yang ada, serta mengetahui faktor serta pengaruh adanya perubahan fungsi sekarang dengan masa lalu. Morfologi terkait erat dengan perubahan periodisasi untuk melihat perubahan yang terjadi pada kawasan. Periodisasi yang digunakan adalah membandingkan pada tahun awal peruntukan kawasan kecamatan Klojen pada tahun 1997 dengan sekarang ini pada tahun 2016.

Morfologi spasial lingkungan sebagai bentuk susunan lingkungan fisik pada skala kawasan dalam waktu yang telah ditentukan. Analisa secara keseluruhan dibagi menjadi 4 aspek sebagai berikut :

1. Analisa terhadap tata guna lahan pada kawasan. Tata guna lahan terkait erat dengan peruntukan lahan pada kawasan.
2. Analisa terhadap tata letak massa. Analisa berkaitan dengan posisi massa dan susunannya di dalam kawasan yang mempengaruhi hubungan aktivitas.
3. Analisa terhadap tata kavling. Tahap analisa ini berkaitan dengan pola dan fungsi setiap blok kavling pada kawasan studi
4. Analisa terhadap tata sirkulasi. Tata sirkulasi sebagai suatu susunan jalan di antara bangunan ataupun batas ruang yang ada di dalam kawasan.

3. Hasil dan Pembahasan

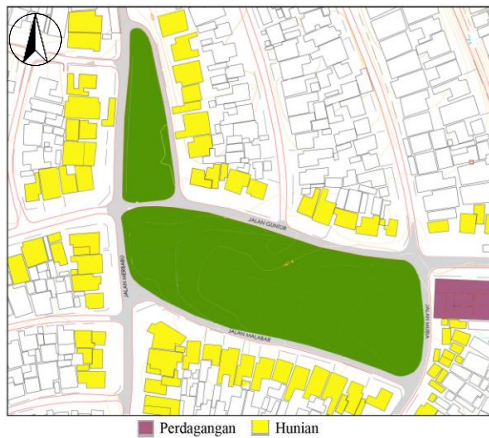
Lokasi studi berada kawasan Malabar-Merbabu Kecamatan Klojen Kota Malang. Lokasi studi dapat diakses dengan mudah karena berada pada koridor jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan jalur antar wilayah pada kota Malang.



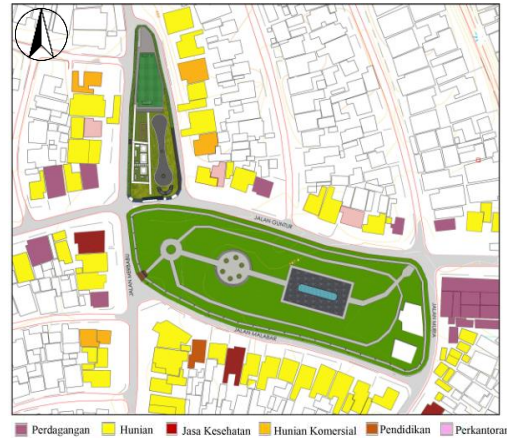
Gambar 1. Lokasi kawasan Malabar-Merbabu

3.1. Tata guna lahan

Tabel 1. Tata guna lahan pada kawasan Malabar-Merbabu Tahun 1997



Tahun 2016



Analisis:

- Sesuai dengan penataan *Bouwplan V* fungsi kawasan sebagai fungsi hunian, pada tahun 1997 kawasan masih didominasi sebagai fungsi hunian privat
- Prosentase fungsi pada kawasan Malabar-Merbabu terdiri dari 61% hunian, 7% perdagangan, 32% ruang terbuka
- Perbandingan *solid* dan *void* masih didominasi oleh *void*, karena masing masing hunian memiliki area terbuka hijau berupa halaman

Analisis:

- Perkembangan Hutan kota Malabar yang turut mempengaruhi perubahan kawasan.
- Prosentase fungsi pada tahun 2016, 33% hunian, 18,3 perdagangan, 3% pendidikan, 10,7% kesehatan, 5% perkantoran, 30% RTH
- Pada tahun ini, dominasi *solid* dan *void* kawasan didominasi oleh *solid*.

Sintesis:

- Perubahan tata guna lahan terjadi karena perubahan dominasi fungsi tidak berpengaruh besar terhadap fungsi tata guna lahan kawasan secara umum sebagai area permukiman.
- keberadaan *void* pada kawasan ini sesuai dengan peraturan keberadaan RTH yaitu prosentase 30% ruang terbuka dari luasan pada kawasan dengan luas sebesar 29.724 m².

Pada awalnya kawasan ini hanya terdiri dari beberapa fungsi yang menunjang fungsi hunian. Sebagai kawasan kaum elit yang ada di kota Malang, maka fasilitas sekitarnya menjadi perhatian penting agar tidak mengganggu satu sama lain. Namun, seiring perkembangannya sekarang ini, kawasan Malabar-Merbabu cenderung menjadi kawasan yang tidak berorientasi pada kawasan hunian privat. Perubahan tata guna lahan karena terjadi perubahan fungsi komersial yang terjadi pada kawasan dengan fungsi privat.

Perubahan kawasan yang terjadi pada tahun 1997 masih berorientasi pada peruntukan kawasan sebagai fungsi permukiman sesuai dengan penetapan peraturan kecamatan Klojen kota Malang. Pada tahun 2013, kawasan Malabar Merbabu mengalami perkembangan beberapa fungsi ini disebabkan adanya perkembangan pada ruang terbuka Taman Merbabu yang turut menjadikan ruang terbuka ini sebagai ruang aktivitas. Selanjutnya, pada tahun 2015 Perubahan fungsi pada kawasan disebabkan karena kota Malang sebagai salah satu tujuan pariwisata yang semakin ramai sehingga meningkatkan kebutuhan di bidang akomodasi. Pada tahun 2016, adanya perkembangan Hutan kota Malabar menjadi faktor perubahan fungsi serta aktivitas pada kawasan.

3.2. Tata letak massa

Tabel 2. Tata letak massa pada kawasan Malabar-Merbabu Tahun 1997



Analisis:

- Orientasi massa bangunan terhadap kawasan mengarah ke jalan utama dan ruang terbuka untuk pencapaian dan mengangkat karakter eks-kolonial.
- Konfigurasi memiliki bentuk konfigurasi permukiman terencana karena memiliki perencanaan dalam *Bouwplan V* tahun 1925.
- Pada awal adanya kawasan *Bergenbuurt* KDB antara 50% - 70% dengan jumlah 1-2 lantai.

Analisis:

- Orientasi bangunan tidak mengalami perubahan menghadap ke jalan utama.
- Kawasan memiliki potensi cenderung mengalami perubahan fungsi maupun massa dengan pola kawasan yang teratur.
- Pada peraturan KDB maksimum hingga 90%. Namun, pada kawasan KDB berkisar antara 50% - 70% dengan jumlah 1-2 lantai.

Sintesis:

Orientasi massa pada kawasan didominasi menghadap ke jalan utama dan mengarah ke RTH pada kawasan baik Taman Merbabu maupun Hutan kota Malabar. Bentuk pola permukiman merupakan konfigurasi terencana sebagai kawasan permukiman. Perubahan letak massa kawasan baik secara KLB, KDB, *setback* dipengaruhi oleh fungsi bangunan yang cenderung bersifat komersil sehingga mempengaruhi kebutuhan parkir.

Perubahan letak massa pada kawasan dipengaruhi adanya perubahan massa pada bangunan. Secara bentuk geometris massa dari masing-masing bangunan didominasi dengan bentuk persegi atau persegi panjang yang mengalami adisi maupun substraksi. Tata letak massa dipengaruhi dengan indikator orientasi, ukuran dan bentuk massanya.

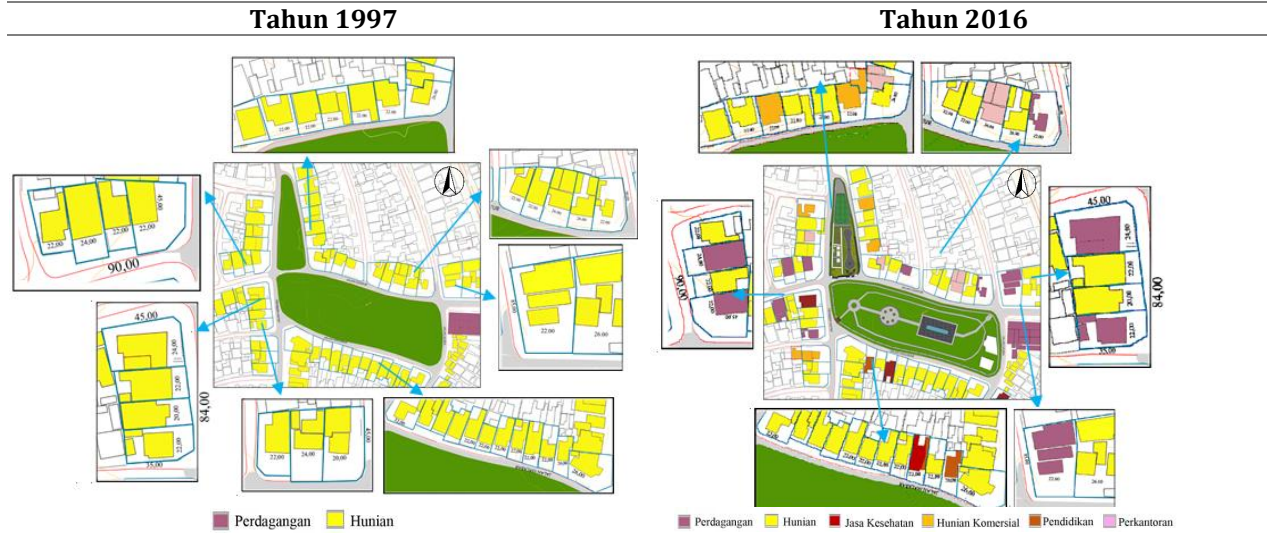
Tata letak massa pada tahun 1997 memiliki orientasi dengan arah ke jalan utama dan ruang terbuka untuk mengangkat karakter kawasan, bentuk konfigurasi kawasan sebagai kawasan permukiman terencana. Pada tahun 2013, orientasi bangunan dan konfigurasi bentuk pada kawasan tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan pada KDB, KLB, TLB karena sesuai dengan fungsi hunian. Pada tahun 2015, perubahan juga terjadi pada kebutuhan KDB, KLB, dan TLB karena kebutuhan fungsi komersial berupa parkir sehingga *setback* menjadi area parkir untuk pengunjung. Pada tahun 2016, jarak tiap massanya tidak terlalu padat, sedangkan *set back* bermacam-macam karena tiap kavling memiliki perbedaan dimensi maupun area terbuka. Pengurangan setback, kdb, klb akibat adanya lahan parkir *on street* dioptimalkan dengan penambahan lahan parkir pada kawasan.

3.3. Tata Kavling

Fungsi hunian pada kawasan didominasi sebagai hunian privat dengan fungsi utama kawasan sebagai area permukiman. Bentuk blok kavling pada kawasan memiliki bentuk dan dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari setiap massa bangunan. Menurut Ching (2008), bentuk persegi merupakan bentuk paling efisien dan dinamis. Untuk bentuk tersebut dapat dioptimalkan dalam penambahan bentuk massa bangunan pada setiap blok kavling.

Pada tahun 1997, orientasi bangunan pada kawasan mengarah ke jalan utama dan ruang terbuka sebagai alternatif pencapaian dan untuk mengangkat karakter kawasan, bentuk kavling rata-rata dengan bentuk persegi dan persegi panjang. Pada tahun 2013, perubahan orientasi cenderung miring karena letaknya yang *hook* dan dimanfaatkan untuk menarik pengunjung untuk datang. Bentuk kavling bangunan mengalami perubahan karena adanya penambahan fungsi dan massa baru pada kavling. Tahun 2015, orientasi massa tidak mengalami perubahan. Penambahan massa bangunan turut mempengaruhi bentuk blok kavling serta dimensinya. Pada tahun 2016, bentuk kavling rata-rata memiliki bentuk yang tidak sama mulai dari bentuk persegi, persegi panjang maupun *letter "L"*. Menurut Ching (2008), bentuk persegi merupakan bentuk paling efisien dan dinamis.

Tabel 3. Tata kavling pada kawasan Malabar-Merbabu



Analisis:

- Orientasi massa bangunan pada blok kavling menghadap ke jalan utama, jalan Malabar, Merbabu, Muria dan Guntur. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam pencapaian dari kawasan menuju bangunan.
- Bentuk kavling yang berbeda-beda karena mengikuti bentuk dari lahan yang tersedia pada kawasan, sehingga terbentuk secara organik.

Analisis:

- Orientasi massa bangunan pada blok kavling tidak mengalami perubahan. Dominasi orientasi masih menghadap ke jalan utama.
- Pada tahun ini beberapa fungsi tidak mengalami banyak perubahan pada bentuk massa maupun blok kavling.

Sintesis:

Orientasi massa bangunan menghadap ke jalan utama dan area terbuka Bentuk blok kavling pada kawasan memiliki bentuk dan dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari setiap massa bangunan. Bentuk kavling rata-rata memiliki bentuk yang tidak sama mulai dari bentuk persegi, persegi panjang maupun letter "L". Bentuk blok kavling persegi mengacu pada bentuk lahan serta massa bangunan eks-kolonial yang cenderung simetris persegi.

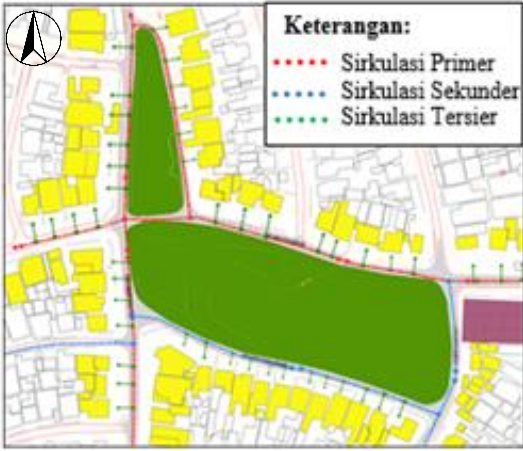
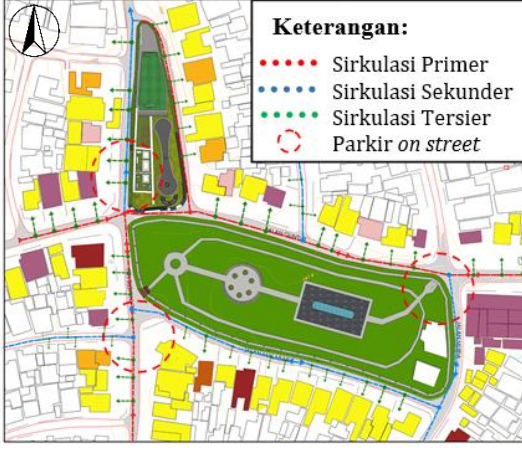
3.4. Tata Sirkulasi

Pada variabel morfologi lingkungan tata sirkulasi terdiri dari fungsi sirkulasi, konfigurasi dan ukuran. Jenis sirkulasi jalan terdiri dari jalan utama, jalan sekunder dan jalan tersier. Jalan utama pada kawasan Jalan utama pada kawasan memiliki 4 jalan berupa jalan Guntur, Muria, Malabar dan Merbabu dengan lebar jalan 5-7 meter digunakan oleh kendaraan roda 4 dua lajur. Jalan sekunder memiliki ukuran jalan dengan lebar 4-6 meter. Pada jalan ini dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalan tersier terdapat pada setiap kavling pada bangunan yang menghubungkan sirkulasi menuju ke sirkulasi utama dan sirkulasi sekunder.

Pada tahun 2013 jalan pada kawasan Malabar-Merbabu tetap memiliki tiga jalan utama, sekunder dan tersier. Pada tahun ini terjadi perubahan jalan utama menjadi jalan sekunder pada jalan Merbabu karena adanya kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut. Jalan sekunder di jalan Merbabu ini dimanfaatkan sebagai parkir untuk ruang terbuka Taman Merbabu dan fungsi perdagangan. Pola *linear* yang terbentuk karena adanya bentuk pola kawasan dengan RTH yang mengelilingi setiap massa bangunan. Pada tahun 2015, permasalahan sirkulasi pada penetapan keberadaan sirkulasi satu arah dan dua arah. Hal

tersebut karena belum adanya penanda khusus bagi pengguna jalan sehingga cenderung berpotensi menimbulkan kecelakaan pada kawasan. Pada tahun 2016, jenis jalan terdiri dari jalan utama, jalan sekunder dan jalan tersier. Kawasan lebih didominasi oleh jalan sekunder baik secara dimensi maupun berdasarkan persebarannya. Memiliki sistem pola jalan *grid* yang tidak beraturan, dan konfigurasi jalurnya berupa linier dengan kombinasi pola jaringan. Dari jenis dan dimensi jalan yang ada dapat mempengaruhi pada jenis pengguna serta fungsi jalan nantinya.

Tabel 4. Tata sirkulasi pada kawasan Malabar-Merbabu

Tahun 1997	Tahun 2016
 <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sirkulasi Primer Sirkulasi Sekunder Sirkulasi Tersier 	 <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sirkulasi Primer Sirkulasi Sekunder Sirkulasi Tersier ○ Parkir on street
<p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar sirkulasi pada kawasan adalah sirkulasi yang terencana untuk kebutuhan hunian. - Pola jalan pada kawasan menggunakan pola jalan grid tidak beraturan dengan konfigurasi jalur berupa jalan <i>linear</i> bercabang dengan kombinasi pola jaringan. 	<p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Keberadaan Hutan kota Malabar mempengaruhi sirkulasi pada kawasan berupa kebutuhan parkir kendaraan. -Konfigurasi jalur pada kawasan menggunakan sirkulasi <i>linear</i> bercabang dengan kombinasi pola jaringan. Dari jenis dan dimensi jalan mempengaruhi pengguna serta fungsi jalan.
<p>Sintesis:</p> <p>Perkembangan jalan dapat mempengaruhi perkembangan kawasan yang menjadi jalan penghubung antar wilayah kota Malang sehingga memunculkan potensi fasilitas ekonomis. Sistem pola jalan yang ada pada kawasan berupa jalan dengan pola <i>grid</i> yang cenderung tidak beraturan pada setiap kavling. Konfigurasi jalurnya berupa jalur <i>linear</i> bercabang ke beberapa pola jaringan. Penggunaan pola jalan pada kawasan belum dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki yang nyaman pada kawasan.</p>	

4. Kesimpulan

Pada morfologi spasial lingkungan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi spasial lingkungan antara lain tata guna lahan, tata letak massa, tata kavling dan tata sirkulasi. Kawasan Malabar-Merbabu ini memiliki dominasi tata guna lahan permukiman. Perkembangan kawasan Malabar-Merbabu terus terjadi penambahan fungsi yang semakin beragam hingga sekarang meliputi zonasi fungsi hunian komersial dan non-hunian komersial, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi perkantoran. Peruntukan guna lahan pada kawasan Malabar-Merbabu dari tahun 1997-2016 ini didominasi oleh lahan terbangun berupa fungsi bangunan hunian.

Elemen tata letak massa terdiri dari bangunan yang memiliki zonasi fungsi hunian komersial dan non-hunian komersial. Orientasi dan posisi pada setiap massa bangunan mengarah ke sirkulasi yaitu jalan utama dan RTH untuk pencapaian pada kavling dan mengangkat karakter eks-kolonial pada kawasan. Perubahan bentuk bangunan yang ada tersebut masih didominasi oleh geometris dasar persegi dan persegi panjang yang mengalami transformasi bentuk baik adisi maupun substraksi massa.

Penataan blok kavling yang ada pada kawasan Malabar Merbabu ini terbentuk sesuai ketersediaan lahan yang ada pada kawasan. Fungsi dari tiap blok kavling didominasi oleh fungsi permukiman. Setiap massa bangunan memiliki bentuk dari blok kavling yang ada pada perumahan didominasi oleh bentuk persegi, persegi panjang, huruf L dan mengikuti bentuk lahan. Jenis jalan terdiri dari jalan utama, jalan sekunder dan jalan tersier. Kawasan lebih didominasi oleh jalan sekunder baik secara dimensi maupun berdasarkan persebarannya. Memiliki sistem pola jalan *grid* yang tidak beraturan, dan konfigurasi jalurnya berupa *linier* dengan kombinasi pola jaringan. Dari jenis dan dimensi jalan yang ada dapat mempengaruhi pada jenis pengguna serta fungsi jalan nantinya.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, Eko. (1983). *Menuju Arsitektur Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Carmona, Matthew. (2003). *Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design*. Oxford: Architectural Press.
- Ching, DK. (2008). *Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tata Letak Edisi Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga Dewi
- Handinoto. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pemerintah Daerah Kota Malang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 2030*. Malang: Pemerintah Daerah Kota Malang.
- Pemerintah Daerah Kota Malang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 63*. Malang: Pemerintah Daerah Kota Malang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.